

Judul : Data angka kemiskinan BPS beda dengan Bank Dunia
Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Data Angka Kemiskinan BPS Beda Dengan Bank Dunia

Perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia menjadi sorotan. Perbedaan tersebut dinilai tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan garis kemiskinan, indikator, serta metodologi yang digunakan. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut turun dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 8,47 persen. Dalam

pengukurannya, BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp 669.235 per kapita per bulan. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang berbeda. Untuk negara berpendapatan menengah bawah, Bank Dunia menggunakan batas US\$ 4,20 per orang per hari atau sekitar Rp 765 ribu per bulan berdasarkan paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP) 2021. Perbedaan garis kemiskinan tersebut membuat jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dapat

berbeda cukup signifikan. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan, perbedaan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam, agar publik mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai penyebab perbedaan angka kemiskinan. "Kita sudah meminta Bappenas untuk mengkaji indikator yang digunakan dalam menetapkan tingkat kesejahteraan masyarakat kita," kata Kamrussamad. Sementara itu, Manager Riset Seknas FITRA Badiul Hadi menilai

perbedaan angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia merupakan konsekuensi dari penggunaan garis kemiskinan yang berbeda. Namun, Badiul mengingatkan Pemerintah agar tidak menjadikan angka kemiskinan 8,07 persen semata-mata sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. "Jangan sampai Pemerintah hanya menggunakan angka 8,07 persen sebagai ukuran keberhasilan," ujarnya. Perbedaan metodologi dan garis kemiskinan tersebut pada

akhirnya menunjukkan bahwa satu angka kemiskinan tidak selalu menggambarkan seluruh kondisi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, transparansi mengenai indikator, metodologi, serta kualitas data menjadi penting agar angka kemiskinan dapat digunakan secara tepat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Untuk mengulasnya, berikut wawancara dengan Badiul Hadi dan Kamrussamad terkait perbedaan angka kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS.

KAMRUSSAMAD, Anggota Komisi XI DPR RI

Publik Harus Dapat Informasi Yang Utuh



“Di BPS, banyak variabel yang digunakan: Sandang, pangan, dan papan menjadi bagian dari variabel tersebut, termasuk yang diukur berdasarkan pengeluaran masyarakat.”

Ada perbedaan angka kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS yang cukup jauh. Bagaimana Anda melihat perbedaan ini?

Kita sudah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji indikator yang digunakan dalam menetapkan tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Indikator yang selama ini digunakan BPS, yang jumlahnya lebih dari 30 indikator dalam mengklasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat, kami minta dibuatkan matrikulasi sekaligus dikompilasi dengan kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia. Dengan begitu, kita bisa melihat di mana letak perbedaannya dan di mana persamaannya. Dengan demikian, ada dasar yang

jelas untuk menjelaskan kepada publik mengapa angkanya bisa berbeda cukup besar. Jadi, perbedaan itu bisa berasal dari indikator yang digunakan.

Apakah metodologi juga bisa menimbulkan perbedaan?

Bisa juga berasal dari metodologi. Jadi, modeling yang digunakan BPS dalam mengolah dan menetapkan hasil dari data yang sudah dikumpulkan dan diintegrasikan, misalnya melalui DTSEN, itu mesti dicek. Apakah metodologi yang sama juga digunakan oleh Bank Dunia atau berbeda.

Kalau berbeda, kita perlu melihat mana yang menjadi *best practice*. Negara mana saja yang memiliki

karakteristik dan ukuran ekonomi yang relatif sama dengan Indonesia, misalnya Meksiko atau negara-negara lain yang berada pada level yang sama dengan Indonesia. Jadi, ada dua hal yang kami minta ditekankan. Pertama, indikator yang digunakan. Kedua, metodologi yang digunakan. Kita menunggu hasil kajian Pemerintah mengenai hal tersebut.

Tapi perbedaannya cukup jauh?

Iya, karena indikatornya berbeda. Di BPS, banyak variabel yang digunakan. Sandang, pangan, dan papan menjadi bagian dari variabel tersebut, termasuk yang diukur berdasarkan pengeluaran masyarakat.

Nah, data pengeluaran ini juga kami minta untuk dilengkapi. ■ REN

BADIUL HADI, Manager Riset Seknas FITRA

Turunnya Angka, Jangan Jadi Patokan Keberhasilan



“BPS penting untuk targeting kebijakan domestik, sedangkan ukuran Bank Dunia penting untuk membandingkan posisi Indonesia dengan negara lain.”

Angka kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS berbeda. Bagaimana pandangan Anda?

Kalau melihat datanya, BPS mencatat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Angka ini turun dari 8,47 persen pada Maret 2025. Garis kemiskinan BPS sendiri sebesar Rp 669.235 per kapita per bulan.

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang berbeda. Untuk negara berpendapatan menengah bawah, digunakan batas US\$ 4,20 per orang per hari atau sekitar Rp 765 ribu per bulan berdasarkan PPP 2021. Jadi, wajar apabila hasil pengukurannya tidak sama dengan BPS.

Apa catatan Anda terhadap perbedaan angka tersebut?

Justu yang perlu dikritisi adalah jangan sampai Pemerintah hanya menggunakan angka 8,07 persen sebagai ukuran keberhasilan. Dengan garis kemiskinan yang relatif rendah, terdapat kelompok masyarakat yang secara statistik tidak tergolong miskin, tetapi secara ekonomi sangat rentan ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau guncangan ekonomi.

Bank Dunia sendiri menegaskan bahwa garis kemiskinan nasional dan internasional memang memiliki tujuan yang berbeda. BPS penting untuk targeting kebijakan domestik, sedangkan ukuran Bank Dunia penting untuk membandingkan posisi Indonesia dengan negara lain.

Apakah dampak dari angka kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan pengukuran BPS?

Pengukuran BPS ini akan berdampak domino terhadap sektor-sektor yang menjadi perhatian global, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Yang tidak kalah penting adalah transparansi metodologi dan kualitas kebijakan anggarannya.

Apa harapan Anda?

Pemerintah jangan berhenti pada klaim penurunan persentase kemiskinan. Pemerintah harus menunjukkan apakah belanja sosial benar-benar mampu menurunkan kerentanan, memperbaiki layanan dasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. ■ REN